

Fundamentalisme Agama dalam Gerakan Protes Sosial: Analisis Konflik Keagamaan Melalui Teori Gerakan Sosial

Nur Lutfiah¹, Cahaya Ningrum², Surawan³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
 Email: nurlutfiah5544@gmail.com¹, cahayaningrum400@gmail.com²,
surawan@uin-palangkaraya.ac.id³

Abstrak. Fenomena fundamentalisme agama dalam gerakan protes sosial menunjukkan bagaimana identitas keagamaan sering dijadikan simbol sekaligus alat mobilisasi massa. Idealnya agama berfungsi sebagai sumber kedamaian dan solidaritas sosial, namun dalam konteks protes sosial, fundamentalisme justru dapat memicu konflik horizontal dan memperkuat eksklusivitas identitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis dinamika fundamentalisme agama melalui kerangka teori gerakan sosial. Fokus utama kajian terletak pada aspek mobilisasi sumber daya, framing isu, dan peluang politik yang memungkinkan gerakan keagamaan berkembang menjadi protes sosial terorganisir. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teori gerakan sosial memberikan perspektif baru dalam memahami konflik keagamaan, karena mampu menjelaskan keterhubungan antara ideologi keagamaan, strategi mobilisasi, dan konteks politik yang melingkupinya. Penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik mengenai fundamentalisme dan konflik keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi upaya resolusi konflik yang lebih konstruktif di ranah sosial-politik.

Kata Kunci: Fundamentalisme Agama, Gerakan Protes Sosial, Konflik Keagamaan, Teori Gerakan Sosial, Mobilisasi Sumber Daya.

Abstract. The phenomenon of religious fundamentalism in social protest movements demonstrates how religious identity is often used as both a symbol and a tool for mass mobilization. Ideally, religion serves as a source of peace and social solidarity, yet within the context of social protests, fundamentalism can instead trigger horizontal conflicts and reinforce identity exclusivity. This study employs a qualitative approach with a literature review method to analyze the dynamics of religious fundamentalism through the framework of social movement theory. The main focus lies on resource mobilization, issue framing, and political opportunities that enable religious movements to develop into organized social protests. The analysis shows that applying social movement theory offers a new perspective for understanding religious conflicts, as it explains the interconnection between religious ideology, mobilization strategies, and the surrounding political context. This research not only enriches the academic discourse on fundamentalism and religious conflict but also provides practical contributions to efforts for more constructive conflict resolution in the socio-political sphere.

Keywords: Religious Fundamentalism, Social Protest Movements, Religious Conflict, Social Movement Theory, Resource Mobilization.

PENDAHULUAN

Fenomena fundamentalisme agama dalam konteks sosial-politik kontemporer menjadi isu yang kian relevan dan mendesak untuk dikaji, terutama ketika ia bermanifestasi dalam gerakan protes sosial yang masif. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, aksi protes massa seringkali diwarnai oleh simbol, narasi, dan legitimasi yang berakar pada ajaran agama. Data dari Pew Research Center menunjukkan peningkatan signifikan dalam konflik bernuansa agama di lebih dari 40 negara, yang menggarisbawahi eratnya hubungan antara identitas keagamaan dan mobilisasi massa.¹ Di Indonesia sendiri, Aksi Bela Islam 2016 menjadi contoh nyata bagaimana narasi keagamaan dapat memobilisasi massa dalam skala besar, menegaskan bahwa fundamentalisme agama bukan sekadar wacana teologis, melainkan juga memiliki dimensi sosial-politik yang kuat dalam menggerakkan aksi sosial.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji keterkaitan antara agama dan konflik sosial. Esposito berpendapat bahwa fundamentalisme agama sering muncul sebagai respons terhadap modernisasi dan globalisasi yang dianggap mengikis nilai-nilai religius.² Sementara itu, Juergensmeyer menyoroti bagaimana fundamentalisme agama menciptakan narasi kosmik tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang diwujudkan dalam aksi kolektif.³ Konteks Indonesia juga telah diteliti, di mana Noorhaidi mencatat kebangkitan gerakan Islam konservatif seiring dengan menguatnya ruang ekspresi politik identitas pascareformasi.⁴ Meskipun demikian, sebagian besar penelitian ini cenderung berfokus pada aspek ideologis dan politis dari fundamentalisme, sementara mekanisme mobilisasi dan pembingkai narasi dalam gerakan protes belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji fenomena ini, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang ada. Penelitian terdahulu umumnya belum secara komprehensif menganalisis bagaimana gerakan fundamentalis keagamaan secara praktis memobilisasi dukungan, memanfaatkan peluang politik, dan membingkai isu-isu konflik ke dalam narasi keagamaan yang efektif. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya melihat agama sebagai faktor ideologis, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mampu menggerakkan aksi kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan perspektif teori gerakan sosial sebagai kerangka analisis untuk mengisi kekosongan ini, terutama dengan menyoroti tiga aspek utama: mobilisasi sumber daya, peluang politik, dan pembingkai isu.

¹ Pew Research Center. (2023). *Global Restrictions on Religion*. Washington, DC: Pew Forum on Religion & Public Life.

² Esposito, J. L. 2019. *Islam and Political Violence: Fundamentalism, Globalization, and the West*. Oxford: Oxford University Press.

³ Juergensmeyer, M. (2017). *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. 4th ed. Berkeley: University of California Press.

⁴ Noorhaidi, H. (2009). Islamist Party, Electoral Politics and Da 'wa Mobilization among Youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. <https://hdl.handle.net/10356/88110>

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran fundamentalisme agama dalam gerakan protes sosial. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ideologi fundamentalis membentuk identitas kolektif, bagaimana proses mobilisasi sumber daya dilakukan, dan bagaimana narasi keagamaan dibingkai untuk memperkuat legitimasi gerakan dan memengaruhi konflik sosial.

Dengan menggunakan pendekatan teori gerakan sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan (*novelty*) dengan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika fundamentalisme agama dari perspektif mekanistik, bukan hanya ideologis. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih rinci tentang bagaimana dan mengapa suatu gerakan fundamentalis berhasil memobilisasi dukungan massal, sebuah aspek yang masih minim eksplorasi dalam literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam mengelola potensi konflik keagamaan secara lebih konstruktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, karena fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam fenomena fundamentalisme agama dalam gerakan protes sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji makna, proses, dan dinamika sosial yang berkembang secara alamiah di tengah masyarakat. Menurut Creswell dan Creswell, penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi serta memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial.⁵ Sejalan dengan itu, Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, maupun perilaku yang diamati secara langsung sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap realitas sosial.⁶ Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif maupun nonpartisipatif untuk mengamati dinamika aksi, simbol, narasi, serta praktik keagamaan yang muncul dalam konteks gerakan protes. Menurut Sugiyono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai perilaku, aktivitas, maupun situasi sosial yang sedang berlangsung sehingga peneliti dapat memahami fenomena secara lebih mendalam.⁷

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan mengacu pada tahapan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan melalui reduksi data,

⁵ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

⁶ Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

⁷ Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

pengelompokan tema-tema seperti ideologi fundamentalis, mobilisasi massa, identitas keagamaan, dan *framing* konflik, kemudian diinterpretasikan berdasarkan perspektif teori gerakan sosial.⁸ Braun dan Clarke menjelaskan bahwa analisis tematik merupakan metode yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan pola atau tema yang muncul dalam data kualitatif.⁹ Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi terhadap dokumen atau arsip pendukung, melakukan pengamatan berulang guna memastikan konsistensi data, serta mendiskusikan hasil temuan dengan sejawat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dari penelitian ini menjadi sangat relevan ketika dikaji dalam konteks protes sosial yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, khususnya yang menargetkan kebijakan pemerintah dan DPR. Gelombang demonstrasi besar-besaran pada tahun 2019 yang menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) berfungsi sebagai studi kasus yang kritis. Peristiwa-peristiwa ini secara jelas menunjukkan bagaimana identitas kolektif, baik yang berlandaskan pada afiliasi keagamaan maupun kelompok masyarakat sipil yang lebih luas, dapat dimobilisasi secara efektif untuk menyuarakan ketidakpuasan publik. Dalam beberapa aksi protes tersebut, tokoh-tokoh agama memainkan peran penting dengan memberikan orasi, memimpin doa kolektif, dan dengan demikian, meningkatkan legitimasi moral gerakan. Pengamatan ini konsisten dengan analisis Kuswana et al, yang berpendapat bahwa eskalasi konflik sering kali memanfaatkan momentum politik, di mana penggunaan narasi religius memberikan daya tarik moral yang kuat pada tuntutan para pengunjuk rasa.

Fenomena fundamentalisme agama dalam gerakan protes sosial ini dapat diamati melalui penggunaan strategis simbol dan praktik keagamaan. Elemen-elemen yang terlihat mencakup spanduk yang bertuliskan ayat-ayat suci, seragam bernuansa religius, dan doa kolektif yang dilakukan sebelum demonstrasi. Data wawancara lebih lanjut mengungkapkan bahwa para pemimpin aksi sering membingkai tindakan mereka bukan sekadar sebagai tindakan politik, tetapi sebagai kewajiban religius. Temuan ini selaras dengan penelitian Akbar et al, yang mengkaji penggunaan narasi teks suci oleh Front Pembela Islam (FPI) dan menunjukkan bagaimana pembingkai moral berfungsi sebagai pendorong utama mobilisasi, menyediakan landasan aksi yang kuat dan tidak dapat dinegosiasikan.

Mobilisasi Sumber Daya dan Strategi Pembingkai Isu

Keberhasilan suatu gerakan protes yang berlandaskan identitas keagamaan tidak hanya ditentukan oleh kuatnya ideologi yang dianut oleh para anggotanya, tetapi juga

⁸ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

⁹ Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.

sangat bergantung pada kemampuan gerakan tersebut dalam memobilisasi berbagai sumber daya yang dimiliki. Dalam perspektif Resource Mobilization Theory, keberhasilan sebuah gerakan sosial ditentukan oleh kemampuan aktor gerakan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya berupa organisasi, kepemimpinan, jaringan sosial, pendanaan, informasi, maupun legitimasi publik secara efektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, pesantren, majelis taklim, dan kelompok pengajian memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat mobilisasi sumber daya. Lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi organisasi, penyebaran informasi, penggalangan dana, hingga koordinasi teknis pelaksanaan aksi kolektif. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama turut memperkuat efektivitas proses mobilisasi karena pesan yang disampaikan memiliki legitimasi moral yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ekawati *et al.*, yang menyatakan bahwa institusi keagamaan memiliki kapasitas besar dalam membangun solidaritas sosial serta mengorganisasi partisipasi masyarakat pada berbagai aktivitas kolektif.¹⁰

Selain memanfaatkan jaringan keagamaan konvensional, perkembangan teknologi informasi telah memperluas pola mobilisasi melalui pemanfaatan media digital. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan YouTube menjadi instrumen penting dalam menyebarkan narasi gerakan, membangun opini publik, mengoordinasikan aksi, sekaligus merekrut simpatisan dalam waktu yang relatif singkat. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga kapasitas mobilisasi menjadi jauh lebih besar dibandingkan metode komunikasi tradisional. Hasil penelitian Kurniawan *et al.* menunjukkan bahwa media digital telah mengubah pola komunikasi gerakan sosial menjadi lebih terbuka, interaktif, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit diakses melalui organisasi formal. Dengan demikian, mobilisasi sumber daya pada era digital tidak lagi hanya mengandalkan struktur organisasi keagamaan, tetapi juga ditopang oleh jaringan virtual yang mampu membangun solidaritas lintas wilayah secara lebih efektif.

Infrastruktur komunitas keagamaan yang dipadukan dengan jaringan komunikasi digital tersebut membentuk modal sosial yang kuat dalam mendukung keberlangsungan gerakan. Hubungan emosional yang terbangun melalui kesamaan keyakinan, identitas religius, dan pengalaman spiritual menciptakan tingkat kepercayaan (*trust*) yang tinggi di antara anggota kelompok. Kondisi ini memudahkan proses koordinasi, distribusi informasi, serta pengambilan keputusan secara kolektif ketika aksi protes akan dilaksanakan. Penelitian Sakina mengenai gerakan anti-riba menunjukkan bahwa keberhasilan mobilisasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya material, tetapi juga oleh kuatnya jaringan keagamaan yang

¹⁰ Ekawati, E., Umar, N., Hendrajaya, J., & Mubin, F. (2022). Tarekat And Prevention of Radicalism and Religious Fundamentalism in Indonesia: English. *Penamas*, 35(1), 81-98. <https://doi.org/10.31330/penamas.v35i1.558>

mampu membangun komitmen bersama berdasarkan nilai-nilai Islam.¹¹ Dengan kata lain, solidaritas religius berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat keberlangsungan gerakan sosial sekaligus meningkatkan loyalitas anggota terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Selain mobilisasi sumber daya, keberhasilan gerakan protes juga ditentukan oleh kemampuan aktor dalam melakukan strategi pembingkaihan isu (*framing*). Pembingkaihan isu merupakan proses membangun makna terhadap suatu peristiwa sehingga mampu memengaruhi cara masyarakat memahami, menilai, dan merespons suatu persoalan. Mobilization menjelaskan bahwa framing dalam gerakan sosial terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu diagnostic framing, prognostic framing, dan motivational framing.¹² Ketiga bentuk pembingkaihan tersebut saling melengkapi dalam membangun legitimasi gerakan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

Diagnostic framing dilakukan dengan mendefinisikan suatu kondisi sebagai masalah yang dianggap mengancam identitas, keyakinan, atau nilai-nilai agama. Dalam berbagai gerakan protes berbasis agama, isu yang diangkat umumnya dikonstruksi sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol keagamaan, ketidakadilan terhadap kelompok tertentu, atau ancaman terhadap moralitas masyarakat. Proses pembingkaihan ini bertujuan membangun persepsi kolektif bahwa permasalahan tersebut bukan sekadar persoalan individu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota komunitas keagamaan. Ketika masyarakat menerima definisi masalah tersebut, maka akan muncul rasa memiliki terhadap isu yang diperjuangkan sehingga mempermudah proses mobilisasi massa.

Tahap berikutnya adalah prognostic framing, yaitu penyusunan solusi yang dianggap tepat untuk menyelesaikan persoalan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dalam konteks gerakan fundamentalisme agama, solusi yang ditawarkan umumnya berupa aksi kolektif seperti demonstrasi, kampanye publik, penyebaran petisi, boikot, maupun berbagai bentuk advokasi sosial lainnya. Aksi tersebut diposisikan sebagai langkah nyata untuk mempertahankan nilai-nilai agama sekaligus memberikan tekanan kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap munculnya persoalan. Kejelasan strategi penyelesaian masalah menjadi faktor penting karena memberikan arah tindakan yang dapat diikuti oleh anggota gerakan.

Selanjutnya, motivational framing berfungsi membangun dorongan moral agar masyarakat bersedia terlibat dalam aksi kolektif. Keterlibatan dalam gerakan tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas sosial atau politik, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, serta pengabdian kepada ajaran agama. Narasi semacam ini mampu meningkatkan komitmen anggota karena partisipasi mereka tidak semata-mata didorong oleh kepentingan praktis, melainkan juga oleh keyakinan religius yang diyakini memiliki nilai spiritual. Dengan demikian, motivasi

¹¹ Sakina, L. (2019). Gerakan Sosial Anti Riba sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 19(1), 53-68.

¹² Mobilization, P. (1988). Ideology, Frame Resonance. *International Social Movement Research*, 1, 197.

yang terbentuk menjadi lebih kuat dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Azizah *et al.*, mengenai strategi fundamentalisme di kalangan mahasiswa Muslim yang menunjukkan bahwa keberhasilan mobilisasi gerakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun resonansi nilai (*value resonance*).¹³ Semakin sesuai narasi yang dibangun dengan nilai, keyakinan, dan identitas yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap gerakan tersebut. Oleh karena itu, framing tidak hanya berfungsi sebagai strategi komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun identitas kolektif, memperkuat solidaritas, dan mempertahankan keberlanjutan gerakan sosial.

Dalam konteks yang lebih luas, strategi mobilisasi sumber daya dan pbingkaiian isu sebenarnya tidak hanya relevan dalam gerakan sosial berbasis agama, tetapi juga dapat diadaptasi pada bidang pendidikan. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris atau pendidikan karakter, guru dapat menerapkan pendekatan framing dengan mengaitkan materi pembelajaran pada nilai-nilai moral dan budaya yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Literasi digital, misalnya, dapat dibingkai sebagai tanggung jawab moral untuk menyaring informasi, mencegah penyebaran hoaks, serta melindungi identitas budaya dan nilai-nilai keagamaan di ruang digital. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami materi pembelajaran secara kognitif, tetapi juga memiliki keterlibatan emosional dan moral yang lebih kuat. Dengan demikian, konsep mobilisasi sumber daya dan framing tidak hanya memberikan kontribusi dalam memahami dinamika gerakan sosial, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Interaksi Peluang Politik dan Polarisasi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika gerakan protes berbasis agama tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan politik yang melingkupinya. Intensitas mobilisasi massa cenderung meningkat ketika muncul peluang politik (*political opportunity*) yang memberikan ruang bagi kelompok-kelompok sosial untuk menyuarakan tuntutan mereka. Peluang politik tersebut dapat berupa momentum pemilihan umum, pergantian kepemimpinan, perubahan kebijakan pemerintah, maupun munculnya isu-isu nasional yang menyentuh identitas keagamaan. Dalam kondisi demikian, kelompok fundamentalis melihat adanya kesempatan untuk memperluas pengaruh, memperoleh legitimasi publik, sekaligus memperkuat posisi tawar terhadap pemerintah maupun aktor politik lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ideologi atau sumber daya

¹³ Azizah, N. A., Sopian, M., & Buana, P. C. (2021). Faktor dan Strategi Fundamentalisme Agama pada Mahasiswa Muslim. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 4(2), 139-146. <https://doi.org/10.15575/jpib.v4i2.14592>

organisasi, tetapi juga sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan politik yang memungkinkan aksi kolektif berkembang secara lebih luas.

Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum, misalnya, isu-isu keagamaan sering kali mengalami peningkatan intensitas dalam ruang publik. Kondisi tersebut terjadi karena kompetisi politik mendorong berbagai aktor untuk membangun dukungan melalui narasi yang memiliki daya tarik emosional tinggi, termasuk identitas agama. Dalam situasi seperti ini, organisasi maupun kelompok keagamaan memanfaatkan momentum politik untuk mengangkat berbagai isu yang dianggap berkaitan dengan perlindungan nilai-nilai agama, moralitas publik, ataupun kepentingan umat. Penelitian Karim *et al.*, menunjukkan bahwa aktor gerakan mampu membaca perubahan konstelasi politik secara strategis sehingga berbagai aksi protes sering kali diselenggarakan bertepatan dengan momentum politik penting agar memperoleh perhatian media, dukungan masyarakat, dan respons pemerintah yang lebih besar.¹⁴ Dengan kata lain, peluang politik menjadi faktor yang memperkuat efektivitas mobilisasi gerakan karena memberikan ruang yang lebih luas bagi penyebaran narasi dan peningkatan partisipasi massa.

Selain momentum elektoral, peluang politik juga muncul ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dipersepsikan bertentangan dengan nilai-nilai agama atau dianggap merugikan kelompok tertentu. Persepsi terhadap ancaman tersebut kemudian dikonstruksi menjadi isu kolektif yang mampu membangkitkan solidaritas sosial di kalangan pendukung gerakan. Narasi mengenai perlunya mempertahankan ajaran agama, menjaga identitas kelompok, atau melindungi kepentingan umat menjadi landasan moral yang digunakan untuk membenarkan aksi protes. Dalam konteks ini, simbol-simbol keagamaan memiliki fungsi yang sangat penting karena mampu memperkuat legitimasi gerakan sekaligus meningkatkan komitmen anggota untuk terlibat dalam berbagai bentuk aksi kolektif. Semakin besar ancaman yang dipersepsikan terhadap identitas keagamaan, semakin besar pula potensi masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap gerakan tersebut.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan peluang politik berbasis identitas agama membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Ketika narasi keagamaan digunakan secara intensif dalam arena politik, ruang publik berpotensi mengalami polarisasi sosial yang semakin tajam. Polarisasi terjadi karena masyarakat mulai terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan berdasarkan identitas agama, ideologi, maupun afiliasi politik. Perbedaan pandangan yang sebelumnya masih dapat dikelola melalui dialog berubah menjadi pertentangan yang bersifat emosional sehingga mempersempit ruang kompromi dan memperbesar potensi konflik. Kondisi ini semakin diperkuat oleh penyebaran informasi melalui media sosial yang memungkinkan narasi keagamaan menyebar dengan sangat cepat, bahkan sering kali disertai informasi yang belum terverifikasi.

¹⁴ Karim, S., Mamat, S. A., & Possumah, B. T. (2014). Islamism and Democratization in Indonesia Post-Reformation Era: Socio-Political Analysis. *International Journal of Islamic Thought*, 6(1), 79-86.

Mujahiduddin mengingatkan bahwa eksploitasi semangat keagamaan secara berlebihan dalam kepentingan politik memiliki risiko yang besar terhadap stabilitas sosial. Nilai-nilai agama yang pada dasarnya berfungsi sebagai sumber moral dan pemersatu masyarakat dapat berubah menjadi instrumen legitimasi konflik apabila dimanfaatkan untuk membangun dikotomi antara kelompok “kami” dan “mereka”.¹⁵ Akibatnya, identitas keagamaan tidak lagi menjadi sarana memperkuat kohesi sosial, tetapi justru menjadi dasar munculnya prasangka, diskriminasi, bahkan tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Dalam situasi tertentu, konflik tidak hanya terjadi pada tingkat wacana, tetapi dapat berkembang menjadi benturan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat apabila tidak dikelola secara bijaksana.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara fundamentalisme agama dan stabilitas sosial bersifat kompleks. Di satu sisi, agama mampu menjadi sumber solidaritas yang kuat dalam membangun partisipasi masyarakat terhadap berbagai isu sosial. Akan tetapi, di sisi lain, ketika identitas keagamaan dipadukan dengan kepentingan politik yang bersifat kompetitif, potensi terjadinya fragmentasi sosial menjadi semakin besar. Oleh karena itu, pengelolaan ruang publik yang inklusif, penguatan dialog antar kelompok, serta penyampaian narasi keagamaan yang moderat menjadi faktor penting untuk mencegah meningkatnya polarisasi di tengah masyarakat.

Temuan mengenai menguatnya polarisasi sosial tersebut sejalan dengan penelitian Mado *et al.*, yang menunjukkan bahwa fundamentalisme agama memiliki hubungan dengan meningkatnya prasangka sosial terhadap kelompok yang memiliki keyakinan atau pandangan berbeda.¹⁶ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin kuat orientasi fundamentalis seseorang, semakin tinggi pula kecenderungan untuk memandang kelompok lain secara eksklusif dan kurang toleran terhadap perbedaan. Hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan mobilisasi gerakan berbasis agama tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya peluang politik, tetapi juga oleh kemampuan aktor dalam membangun identitas kolektif yang mampu memengaruhi cara masyarakat memandang kelompok lain. Dengan demikian, interaksi antara peluang politik, mobilisasi identitas keagamaan, dan polarisasi sosial menjadi aspek penting yang perlu dipahami untuk menjelaskan dinamika gerakan protes berbasis agama dalam masyarakat kontemporer.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Dari perspektif solusi, para responden menekankan pentingnya pendidikan agama kontekstual, literasi media, dan peran tokoh agama moderat dalam membangun

¹⁵ Mujahiduddin, M. (2013). Religious Fundamentalism and Violence: Is There Any Direct Correlation Between Fundamentalism and Violence?. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(1), 144-156.

¹⁶ Mado, Y. R., Taibe, P., & Purwasetiawatik, T. F. (2023). Hubungan Fundamentalisme Agama dengan Prasangka Sosial pada Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Psikologi Karakter*, 3(2), 546-551. <https://doi.org/10.56326/jpk.v3i2.2295>

narasi tandingan yang lebih inklusif. Gagasan ini sejalan dengan rekomendasi Susanto *et al.*, yang menyoroti pentingnya dialog lintas kelompok dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta tokoh masyarakat untuk mencegah radikalisasi dan konflik horizontal.¹⁷ Dengan demikian, hasil wawancara memberikan dukungan empiris terhadap implikasi praktis penelitian yang menekankan perlunya strategi resolusi konflik berbasis nilai-nilai dialogis dan moderasi beragama. Namun, kedua responden juga menekankan risiko yang muncul dari eksploitasi berlebihan terhadap semangat keagamaan. Menurut mereka, politik identitas yang terlalu dominan berpotensi memperuncing polarisasi sosial, menurunkan kualitas dialog publik, dan bahkan menormalisasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini sejalan dengan analisis Mado *et al.*, yang menunjukkan adanya korelasi positif antara fundamentalisme dan meningkatnya prasangka sosial di kalangan mahasiswa.¹⁸

Selain itu, baik Maisarah maupun Siti Fatimah menyoroti bahwa momentum politik seperti pemilu dan krisis ekonomi sering dimanfaatkan untuk memperbesar skala protes. Hal ini memperkuat temuan Dandi *et al.*, dan Kuswana *et al.*, bahwa gerakan fundamentalis kerap tumbuh subur di tengah ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.^{19,20} Ketika kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal menurun, agama menjadi sumber legitimasi moral yang menggantikan otoritas negara. Dalam aspek framing isu, wawancara menunjukkan bahwa para pemimpin aksi sering menggunakan strategi *diagnostic*, *prognostic*, dan *motivational framing*.²¹ Mereka membingkai suatu kebijakan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai agama (diagnostik), menawarkan aksi protes sebagai solusi (prognostik), dan membangkitkan motivasi religius dengan narasi “membela agama” atau “menjaga martabat umat” (motivasi). Temuan ini secara empiris mendukung analisis artikel yang menekankan bahwa keberhasilan gerakan keagamaan sangat ditentukan oleh kekuatan narasi moral dan resonansi emosional.

Temuan dari wawancara juga mengonfirmasi bahwa media sosial kini menjadi infrastruktur digital yang memperluas jangkauan pesan keagamaan. Responden menjelaskan bahwa platform seperti Instagram dan YouTube digunakan untuk menyebarkan ceramah, poster, hingga video pendek yang menggugah emosi. Hal ini mendukung temuan Kurniawan *et al.*, tentang clicktivism kaum muda Muslim di

¹⁷ Susanto, N. H., Mustakim, Z., Kanafi, I., Kholis, N., & Rahayani, Y. (2024). The Struggle of Local Religions to Deal with Discrimination in Religious Education: From Value Education to Social Movement. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 74-93. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.8477>

¹⁸ Mado, Y. R., Taibe, P., & Purwasetiatatik, T. F. (2023). Hubungan Fundamentalisme Agama dengan Prasangka Sosial pada Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Psikologi Karakter*, 3(2), 546-551. <https://doi.org/10.56326/jpk.v3i2.2295>

¹⁹ Dandi, M., & Muzakki, R. (2023). Analisis Pemikiran Politik Fundamentalisme Islam Dalam Studi Kasus Gerakan Kelompok Fundamental Islam Di Indonesia Pasca Era Reformasi. *Journal of Politics and Democracy*, 2(2), 69-78. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v2i2.30>

²⁰ Kurniawan, A. F., Rahman, A., Achmad, M., & Fahroji, F. R. (2022). Young muslim clicktivism and religious local tradition discourse in Banten and Yogyakarta. *Millab: journal of religious studies*, 863-890. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art9>

²¹ Mobilization, P. (1988). Ideology, Frame Resonance. *International Social Movement Research*, 1, 197.

Indonesia, yang memperlihatkan bagaimana konten religius mampu mengubah isu sosial menjadi gerakan daring berskala luas.²² Kedua responden juga menegaskan bahwa identitas keagamaan berfungsi sebagai alat mobilisasi sosial yang kuat karena memadukan tiga elemen penting: emosi kolektif, jaringan sosial keagamaan, dan simbol-simbol religius. Pandangan ini sejalan dengan teori *resource mobilization* yang menekankan pentingnya sumber daya sosial dan simbolik dalam menggerakkan aksi massa.²³ Dalam konteks Indonesia, jaringan masjid, pesantren, dan kelompok pengajian berfungsi ganda sebagai pusat pembentukan identitas sekaligus media koordinasi gerakan, sebagaimana juga diungkap oleh Ekawati *et al.*, dalam studi tentang peran lembaga keagamaan dalam pencegahan radikalisme.²⁴

Hasil wawancara dengan dua responden memperkuat temuan utama penelitian bahwa fundamentalisme agama tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga operasional dan strategis dalam gerakan protes sosial. Keduanya mendefinisikan fundamentalisme sebagai sikap yang kaku terhadap ajaran agama, disertai penolakan terhadap pluralitas dan interpretasi alternatif. Pandangan ini sejalan dengan argumen Juergensmeyer dan Esposito yang menegaskan bahwa fundamentalisme berakar pada absolutisme kebenaran religius serta kecenderungan memandang dunia dalam dikotomi “benar salah”.^{25,26} Dengan demikian, wawancara ini mendukung kerangka teoritis penelitian yang memandang fundamentalisme bukan hanya sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai sistem tindakan kolektif. Untuk memperkuat temuan tersebut, dilakukan wawancara mendalam dengan dua responden, yaitu Maisarah dan Siti Fatimah Purnamasari. Hasil wawancara ini memberikan dukungan empiris terhadap kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada penekanannya terhadap pentingnya teori gerakan sosial untuk memahami dinamika fundamentalisme agama dalam protes sosial. Dengan mengintegrasikan analisis ideologi, mobilisasi sumber daya, pembingkai isu, dan peluang politik, studi ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk penelitian konflik keagamaan di masa mendatang. Secara praktis, temuan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan narasi tandingan yang inklusif untuk mempromosikan dialog dan toleransi. Lembaga pemerintah, badan pendidikan, dan tokoh agama dapat secara kolektif berperan sebagai mediator dan pendidik,

²² Kurniawan, A. F., Rahman, A., Achmad, M., & Fahroji, F. R. (2022). Young muslim clicktivism and religious local tradition discourse in Banten and Yogyakarta. *Millah: journal of religious studies*, 863-890. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art9>

²³ Mobilization, P. (1988). Ideology, Frame Resonance. *International Social Movement Research*, 1, 197.

²⁴ Ekawati, E., Umar, N., Hendrajaya, J., & Mubin, F. (2022). Tarekat And Prevention of Radicalism and Religious Fundamentalism in Indonesia: English. *Penamas*, 35(1), 81-98. <https://doi.org/10.31330/penamas.v35i1.558>

²⁵ Juergensmeyer, M. (2017). *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. 4th ed. Berkeley: University of California Press.

²⁶ Esposito, J. L. 2019. *Islam and Political Violence: Fundamentalism, Globalization, and the West*. Oxford: Oxford University Press.

membina masyarakat yang lebih toleran dan inklusif.²⁷ Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, pendekatan yang berpusat pada dialog antarbudaya dapat menjadi alat yang berharga untuk mencegah radikalisme di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Fundamentalisme keagamaan dalam gerakan protes sosial menunjukkan bahwa identitas agama berperan penting sebagai sumber mobilisasi massa sekaligus legitimasi moral gerakan. Berdasarkan perspektif teori gerakan sosial, keberhasilan gerakan dipengaruhi oleh kemampuan memobilisasi sumber daya, membingkai isu keagamaan secara efektif, serta memanfaatkan peluang politik yang tersedia. Ketiga faktor tersebut memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengaruh gerakan dalam ruang publik. Di sisi lain, penggunaan narasi keagamaan yang berlebihan atau bersifat eksklusif berpotensi meningkatkan polarisasi sosial dan memperbesar risiko konflik antarkelompok. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dialogis yang melibatkan berbagai pihak serta penguatan narasi yang inklusif untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai, menjaga kohesi sosial, dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. A., Sopian, M., & Buana, P. C. (2021). Faktor dan Strategi Fundamentalisme Agama pada Mahasiswa Muslim. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 4(2), 139-146. <https://doi.org/10.15575/jpib.v4i2.14592>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dandi, M., & Muzakki, R. (2023). Analisis Pemikiran Politik Fundamentalisme Islam Dalam Studi Kasus Gerakan Kelompok Fundamental Islam Di Indonesia Pasca Era Reformasi. *Journal of Politics and Democracy*, 2(2), 69-78. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v2i2.30>
- Ekawati, E., Umar, N., Hendrajaya, J., & Mubin, F. (2022). Tarekat And Prevention of Radicalism and Religious Fundamentalism in Indonesia: English. *Penamas*, 35(1), 81-98. <https://doi.org/10.31330/penamas.v35i1.558>
- Esposito, J. L. 2019. *Islam and Political Violence: Fundamentalism, Globalization, and the West*. Oxford: Oxford University Press.
- Juergensmeyer, M. (2017). *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. 4th ed. Berkeley: University of California Press.
- Karim, S., Mamat, S. A., & Possumah, B. T. (2014). Islamism and Democratization in Indonesia Post-Reformation Era: Socio-Political Analysis. *International Journal of Islamic Thought*, 6(1), 79-86.

²⁷ Susanto, N. H., Mustakim, Z., Kanafi, I., Kholis, N., & Rahayani, Y. (2024). The Struggle of Local Religions to Deal with Discrimination in Religious Education: From Value Education to Social Movement. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 74-93. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.8477>

- Kurniawan, A. F., Rahman, A., Achmad, M., & Fahroji, F. R. (2022). Young muslim clicktivism and religious local tradition discourse in Banten and Yogyakarta. *Millah: journal of religious studies*, 863-890. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art9>
- Mado, Y. R., Taibe, P., & Purwasetiawatik, T. F. (2023). Hubungan Fundamentalisme Agama dengan Prasangka Sosial pada Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Psikologi Karakter*, 3(2), 546-551. <https://doi.org/10.56326/jpk.v3i2.2295>
- Mobilization, P. (1988). Ideology, Frame Resonance. *International Social Movement Research*, 1, 197.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahiduddin, M. (2013). Religious Fundamentalism and Violence: Is There Any Direct Correlation Between Fundamentalism and Violence?. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(1), 144-156.
- Noorhaidi, H. (2009). Islamist Party, Electoral Politics and Da 'wa Mobilization among Youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. <https://hdl.handle.net/10356/88110>
- Pew Research Center. (2023). *Global Restrictions on Religion*. Washington, DC: Pew Forum on Religion & Public Life.
- Sakina, L. (2019). Gerakan Sosial Anti Riba sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 19(1), 53-68.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, N. H., Mustakim, Z., Kanafi, I., Kholis, N., & Rahayani, Y. (2024). The Struggle of Local Religions to Deal with Discrimination in Religious Education: From Value Education to Social Movement. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 74-93. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.8477>